

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)  
OLEH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)  
PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

**Oleh : M. Agung Maulana**

[agung.Maulana@yahoo.com](mailto:agung.Maulana@yahoo.com)

**Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Professional development of the State Civil Apparatus (ASN) is one of the national agendas in the utilization of government apparatus in improving the quality and development of the ASN, Diklat has an important role to help improve ASN's capabilities and competencies. Apparatus Resources have a very strategic position in the organization, meaning ASN plays an important role in carrying out activities to achieve better government goals.*

*The research objective was to find out the education and training program that had been carried out by the Riau Province Human Resources Development Agency (BPSDM) in the improvement and development of the State Civil Apparatus in 2016. The type of research used was Descriptive Qualitative. The location of this study was conducted at the BPSDM Office in Riau Province. The technique of data collection is done by completing information through interviews with informants who are considered competent to support this research and carry out documentation and request the data needed to the agency under study.*

*Research results that show that: (1) The education and training program of BPSDM Riau Province is included in good condition, effective and efficient. This was due to training materials, delivery methods, facilities and infrastructure, widyaswara capacity (speakers), learning process, the proportion of time in delivering the material and the method of organizing training felt by the training participants as well. (2) Quality of Human Resources produced by BPSDM Riau Province experienced an increase based on exposure from informants related to improving the quality of ASN.*

*Keyword : Education and training, BPSDM Province of Riau*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan tergantung dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara. Faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan. Aparatur negara sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan dalam hal ini diperlukan adanya aparatur yang benar-benar mampu, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai suatu tujuan di tentukan oleh kualitas dan kemampuan aparatur yang berada di dalamnya. Oleh karena itu masalah peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur sebagai pegawai negeri sipil ataupun juga sebagai aparatur sipil negara selalu menjadi perhatian dari instansi pemerintah<sup>1</sup>.

Pengembangan sumber daya aparatur juga dirancang untuk memperoleh aparatur-aparatur yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu instansi pemerintah dalam geraknya ke rnsa depan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat b dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yakni mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. selanjutnya guna mendukung penyelenggaraan

pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu maka diperlukan pengembangan sumber daya aparatur sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kemudian dalam pasal 70 ayat 1 dijelaskan bahwa, "Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran". Oleh karena itu pengembangan sumber daya aparatur sangat diperlukan dalam sebuah instansi pemerintahan, karena dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai aparatur sipil negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam peningkatan sumber daya aparatur dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan ASN di Provinsi Riau. BPSDM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyelenggaraan dan pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Bidang pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dalam Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan

---

<sup>1</sup>Justine T. Sirait. "Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi". 2008.. Penerbit PT. GramediaWidiararana Indonesia. Jakarta. Hal: 8

BPSDM. Untuk itu dalam meningkatkan pengembangan dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)”.

Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, Provinsi Riau bertekad menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan pada tahun 2028, olehnya itu semua tatanan yang ada perlu menyikapi secara cermat dan bijaksana. Untuk maksud tersebut tatanan Pemerintah Provinsi Riau bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi yakni *“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”* dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Beranjak dari visi tersebut yang merupakan landasan

perumusan Visi dan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau *“Terdepan Dalam Inovasi Pengembangan Sdm Berbasis Kompetensi”*. Berdasarkan visi tersebut seluruh program yang dilaksanakan oleh di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau tidak keluar dari koridor sasaran Pendidikan dan Pelatihan.

BPSDM Provinsi Riau sebagai lembaga yang mempunyai peran dan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus bisa menjawab masalah minimnya kompetensi para aparatur tersebut. Hal ini dilakukan dengan menciptakan strategi dan kebijakan yang mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, baik itu untuk pegawai internal maupun pegawai yang mengikuti diklat pada umumnya. Sehingga sumber daya manusia aparatur yang profesional, berkualitas serta mempunyai kompetensi yang unggul dapat terwujud.

Strategi-strategi yang disusun oleh BPSDM nantinya harus bisa menghasilkan aparatur yang bisa memenuhi tuntutan pelayanan yang prima yang efektif, transparan, akuntabel, bebas dari KKN sesuai dengan tujuan bersama, sehingga cita-cita dan Visi-misi Daerah akan terwujud dan pemerintahan yang baik (good governance) dapat segera tercapai.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam suatu judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau Tahun 2016”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Pengembangan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara oleh Badan Pengembangan sumber daya manusia Provinsi Riau tahun 2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara oleh Badan Pengembangan sumber daya manusia Provinsi Riau tahun 2016.

## 1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan masukan bagi Badan Pengembangan sumber daya manusia (BPSDM) Provinsi Riau dalam pengembangan karir Aparatur Sipil Negara.

## 1.5 Tinjauan Pustaka Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut dengan Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Negeri Sipil. (PP. RI.NO.101 Pasal 1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS).Adapun ruang lingkup pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan antara lain :

1. Diklat Prajabatan

Diklat prajabatan adalah untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya oraganisainya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya masyarakat. Diklat prajabatan terdiri dari :

- a) Diklat prajabatan golongan I, diklat bagi mereka yang akan ditingkat untuk menjadi PNS Golongan I.
- b) Diklat prajabatan Golongan II, diklat bagi mereka yang akan diangkat menjadi PNS Golongan II.
- c) Diklat prajabatan Golongan III, diklat untuk mereka yang akan dinagkat menjadi PNS Golongan III.

## 2. Diklat Dalam Jabatan

Diklat dalam jabatan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri dari :

- a. Diklat kepemimpinan adalah untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.Diklat jenjang jabatan struktural terdiri dari :
  - 1) Diklat pimpinan tingkat IV, diklat ini bagi mereka yang menduduki jabatan struktural Eselon IV.

- 2) Diklat pimpinan tingkat III, diklat ini bagi mereka yang menduduki jabatan struktural Eselon III.
- 3) Diklat pimpinan tingkat II, diklat ini bagi mereka yang menduduki jabatan struktural Eselon II.
- 4) Diklat pimpinan tingkat I, diklat ini bagi mereka yang menduduki jabatan struktural Eselon I.

b. Diklat Fungsional

Diklat fungsional adalah untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

c. Diklat Teknis

Diklat teknis adalah untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

### Tujuan Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah memperbaiki prestasi kerja pegawai agar dapat memberikan semangat yang optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Tujuan pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal berikut:

a. Produktivitas Kerja

Dengan pengembangan, produktivitas kerja pegawai akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena *technical skill*, *human skill*, dan *managerial skill* pegawai yang semakin baik.

b. Efisiensi

Pengembangan pegawai bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing organisasi semakin besar.

c. Kerusakan

Pengembangan pegawai bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena pegawai semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.

d. Kecelakaan

Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan pegawai, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan organisasi berkurang.

e. Moral

Dengan pengembangan, moral pegawai akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

f. Karier

Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier pegawai semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik.

g. Kepemimpinan

Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relations lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga

pembinaan kerja sama vertical dan horizontal semakin harmonis.

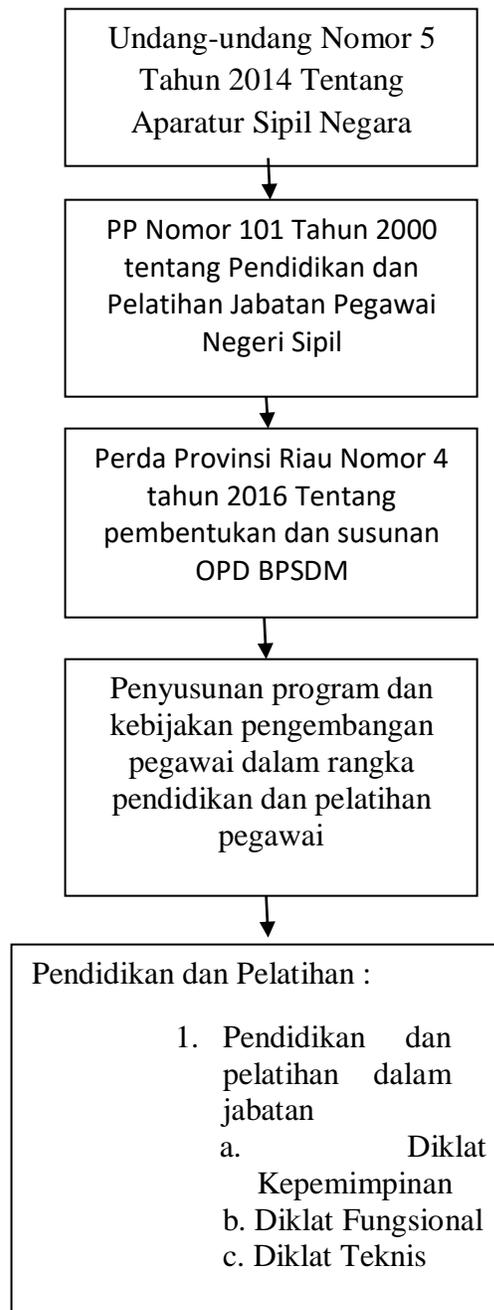
h. Balas Jasa

Dengan pengembangan, balas jasa(gaji, upah insentif, dan benefits)pegawai akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar.

i. Konsumen

Pengembangan pegawai akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang bermutu.<sup>2</sup>

## 1.6 Kerangka Berfikir Penelitian



## 1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan

<sup>2</sup>Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 284

mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Metode deskriptif kualitatif mengkaji lebih dalam mengenai program pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan aparatur sipil negara oleh BPSDM Provinsi Riau.

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti tujuannya agar data dapat terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data menurut Bogdan dan Biklen Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## **PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2016**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa “Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil”. Pendidikan dan pelatihan kepegawaian juga merupakan bagian dari sebuah sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bermakna pada pengembangan kepegawaian. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau terbentuk bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa BPSDM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Sepanjang tahun 2016, BPSDM Provinsi Riau telah menyelenggarakan dan melaksanakan 22 Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) termasuk pendidikan dan pelatihan Fungsional dan jenis pendidikan dan pelatihan Teknis. Adapun Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Oleh BPSDM Provinsi Riau Pada Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	NAMA KEGIATAN	KETERANGAN
1	Diklat PIM Tk. III	DIKLAT KEPEMIMPINAN
2	Diklat PIM Tk. IV	DIKLAT KEPEMIMPINAN
3	Diklat MoT	DIKLAT FUNGSIONAL
4	Diklat fungsional perencana muda	DIKLAT FUNGSIONAL
5	Diklat Analis Kepegawaian	DIKLAT FUNGSIONAL
6	Diklat Bendahara Keuangan Daerah	DIKLAT TEKNIS
7	Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	DIKLAT TEKNIS
8	Diklat Teknis Kearsipan	DIKLAT TEKNIS
9	Workshop Bagi PPTK	DIKLAT TEKNIS
10	Diklat Perumusan Standar Kompetensi	DIKLAT TEKNIS
11	Diklat Pengelolaan Aset Daerah	DIKLAT TEKNIS
12	Diklat Perencanaan Tingkat Dasar	DIKLAT TEKNIS
13	Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	DIKLAT TEKNIS
14	Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas	DIKLAT TEKNIS
15	Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	DIKLAT TEKNIS
16	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	DIKLAT TEKNIS
17	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	DIKLAT TEKNIS
18	Diklat Penilaian Aset Daerah	DIKLAT TEKNIS
19	Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi	DIKLAT TEKNIS
20	Diklat Pelayanan Publik yang Prima dan Berwawasan Good Governance	DIKLAT TEKNIS
21	Diklat ADM Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	DIKLAT TEKNIS
22	Diklat Perumusan Standar Kompetensi Provinsi Riau	DIKLAT TEKNIS

### 3.2 Pelaksanaan Diklat Dalam Jabatan

Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Program Diklat dalam jabatan yang diikuti oleh ASN di pemerintah

provinsi riau ada berbagai jenis Diklat disesuaikan dengan posisi dan jabatan seorang pegawai negeri sipil dan kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang

memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia apartur di Provinsi Riau, maka perlu untuk meningkatkan mutu profesionalisme, sikap dan pengabdian serta kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.

### **3.2.1 Diklat Kepemimpinan**

Pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural disamping syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan ini bersifat selektif dan harus diikuti atas dasar penugasan. Di dalam pendidikan dan pelatihan struktural ini BPSDM Provinsi Riau Pada Tahun 2016 telah melaksanakan 2 macam jenis tingkatan pendidikan dan pelatihan struktural/kepemimpinan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV, diklat ini ditujukan untuk pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon 4.
- b. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III, diklat ini ditujukan untuk pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon 3.

### **3.2.2 Diklat Fungsional**

Diklat fungsional adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Keahlian yang bersangkutan. Adapun pendidikan dan pelatihan fungsional yang telah diselenggarakan selama rentang dari bulan April sampai September 2016 oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau pada Tahun 2016 telah melaksanakan 3 Jenis Diklat Fungsional dengan tingkat kelulusan tinggi.

Tujuan didadakannya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ini tidak lain adalah mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing. Sehingga pegawai yang mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan fungsional ini diharapkan bisa menambah dan mengembangkan kompetensi mereka masing-masing dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan bekerja secara profesional. Dan dilihat dari analisis Program Pendidikan dan Pelatihan Oleh BPSDM Tahun 2016 tergolong baik dan efektif untuk meningkatkan kemampuan ASN

### **3.2.3 Diklat Teknis**

Pendidikan dan pelatihan Teknis merupakan salah satu dari jenis kebijakan dalam rangka pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, yang merupakan salah satu program jenis kebijakan dalam rangka untuk mengembangkan pegawai. Dalam pendidikan dan pelatihan teknis ini lebih menekankan kepada pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas

yang bersifat teknis atau tugas lapangan. Dimana pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi, kemampuan dalam bekerja, pengetahuan yang luas dan lain sebagainya. Peserta Diklat teknis adalah ASN yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis. ASN yang mengikuti Diklat teknis adalah ASN yang telah lulus seleksi dan mendapatkan usulan dan pertimbangan dari baperjakat dan tim seleksi diklat instansi yang berkaitan dalam pekerjaannya dan dalam pelaksanaannya mendapatkan penilaian yang baik.

Pendidikan dan Pelatihan teknis yang telah diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau pada Tahun anggaran 2016 adalah sebanyak 17 macam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Dari 17 macam pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan ini diikuti oleh 595 peserta. 17 kegiatan Diklat Teknis ini menjadi bagian dari program kegiatan BPSDM tahun pada tahun 2016 berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang disusun oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau tahun 2015. Dari analisis tersebut, hampir semua SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan kebutuhan akan Diklat-diklat ini.

Pelaksanaan Diklat Teknis tahun 2016 oleh BPSDM Provinsi Riau diharapkan dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan dan dapat membawa penilaian yang positif dalam hal yang dibutuhkan oleh SKPD masing-

masing. Adapun manfaat yang dirasakan oleh peserta diklat teknis adalah ilmu yang permanen dan bisa diterapkan di bidangnya masing-masing.

Berdasarkan dari informasi dari informan dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Teknis diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau pada tahun 2016 tergolong cukup baik dan efektif dilihat dari indikator kelulusan yang sangat memuaskan dengan hasil 100% kelulusan dari tiap Diklat yang diadakan Oleh BPSDM Provinsi Riau. Peserta yang dinyatakan lulus saat tahapan *Assesment* oleh BPSDM Provinsi Riau diberikan Sertifikat berupa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTTTP). Dengan hal ini dapat dinilai kapasitas ASN yang mengikuti Program Diklat dari BPSDM Provinsi Riau meningkat setelah mengikuti Diklat. walaupun BPSDM Provinsi Riau belum bisa mencapai target yang diharapkan oleh BPSDM Provinsi Riau pada tahun anggaran 2016.

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lembaga Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau, Badan Pengembangan dan sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau

adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam hal pengembangan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparatur, program yang digunakan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara tersebut. Badan Pengembangan dan sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau tahun 2016 telah menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan . Media pendidikan dan pelatihan disini yaitu dengan menyelenggarakan diklat-diklat seperti diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional. Pencapaian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM tahun 2016 tergolong baik, dengan tingkat kelulusan hampir 100% walaupun ada beberapa peserta yang ditunda kelulusannya. hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sudah berjalan dengan baik dan efektif dengan apa yang dirasakan oleh para informan yang telah mengikuti kegiatan Diklat Oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau.

2. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau sudah mengalami peningkatan berdasarkan pemaparan dari

informan yang terkait dengan Analisis pada Pegawai yang mengikuti Diklat di di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka di ajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya Program Diklat, maka disarankan kepada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau diharapkan mempertahankan mekanisme implementasi dari pendidikan dan pelatihan yang sudah ada saat ini dikarenakan menurut penilaian dari penelitian ini sudah berada pada kondisi yang baik, efektif dan efisien.
2. Berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi, di harapkan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau menerima peserta diklat dengan prioritas dari pangkat dan kesenioran. Serta dalam menyelenggarakan diklat lanjutan nantinya perlu lebih memperbanyak praktek dan dilakukan kegiatan Benchmarking ke Best Practice dalam rangka aplicative learning sekaligus untuk belajar inovasi-inovasi baru.

## Daftar Pustaka

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Hasibun, Malayu SP. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Justine, T Sirait. 2008. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Kencana, Ini, Syafiie. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Koswara E., 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Institut Ilmu Pemerintahan Press. Jakarta.
- Nadler. 2006. *Manajemen Pegawai Negeri Sipil Yang Efektif*, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Notoadmojo, Soekidjo. 2007. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suradi. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai*. Penerbit Mandar Baru. Bandung.

## Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Diklat Pegawai.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Provinsi Riau No.95 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau